

## **ABSTRAK**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald)**

**Oleh**

**GILANG RAMADHAN**

Penelitian Hukum ini dibuat untuk mengetahui mengenai pembatalan perkawinan yang mana masyarakat sendiri banyak yang belum mengetahui mengenai pengaturan, praktik dan konsekuensi dari pembatalan perkawinan. Pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan sangatlah penting mengingat sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pembatalan perkawinan, salah satu kasus pembatalan perkawinan yang paling terkenal yaitu pembatalan perkawinan yang terjadi akibat pemalsuan dokumen perkawinan oleh pihak penggugat yaitu Jessica Iskandar. Jessica Iskandar mengaplikasikan dokumen-dokumen yang tak sah, hal yang demikian sudah dilahirkan anak, seolah-olah anak yang demikian dilahirkan dari suatu perkawinan campuran yang sah layak dengan ketentuan tata tertib yang berlaku di bidang hukum perkawinan. Pokok permasalahan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia. 2) Bagaimana praktik pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia. 3) Apa konsekuensi yang muncul akibat adanya pembatalan perkawinan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penulis memperoleh data, dengan demikian menggunakan metode pendekatan yuridis dan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Menggala. Penelitian ini memperoleh sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang kemudian disajikan dengan deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan 1) Pengaturan pembatalan perkawinan diatur dalam 3 aturan yang mengatur secara jelas dan terperinci. Aturan tersebut saling berkaitan dalam mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Pengaturan mengenai batalnya pernikahan diatur dalam Bab IV Pasal 22 hingga Pasal 28 Legislasi tentang Perkawinan, Pasal 70 hingga dengan Pasal 76 KHI dan dalam Bab VI Pasal 37 serta 38 Tata Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 2) Pada praktiknya pembatalan perkawinan dapat melalui proses mediasi yang mana dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan terbaik bagi kedua belah pihak. Selanjutnya dalam putusan pembatalan perkawinan hakim harus melihat tujuan dari perkawinan itu sendiri, apakah pembatalan perkawinan yang diajukan memang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga perkawinan. Dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan, hakim harus memastikan dalam

mengabulkan/menolak permohonan pembatalan perkawinan, hakim harus memastikan ada manfaat yang diberikan dari putusan tersebut kepada para pihak.

3) Konsekuensi dari pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 28 ayat (2), khususnya anak yang lahir dari perkawinan fide, tidak termasuk harta bersama, jika pembatalannya didasarkan pada adanya perkawinan lain, serta pihak ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak yang sah.

**Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Praktik Pembatalan Perkawinan**

**ABSTRACT****MARRIAGE CANCELLATION IN VIEW FROM MARRIAGE LAW IN  
INDONESIA (Case Study of the Marriage between Jessica Iskandar and  
Ludwig Franz Willibald)****By****GILANG RAMADHAN**

*This legal research was made to find out about marriage annulment where many people themselves do not know about the arrangements, practices and consequences of marriage annulment. Knowledge about marriage annulment is very important considering that there have been many cases of marriage annulment in Indonesia, one of the most well-known cases of marriage annulment, namely the annulment of a marriage that occurred due to falsification of marriage documents by the plaintiff, Jessica Iskandar. Jessica Iskandar applies documents that are invalid, such a thing has already been born a child, as if such a child was born from a legal mixed marriage in accordance with the provisions of the regulations that apply in the field of marriage law. The main problems of this research are as follows: 1) How is the regulation of marriage annulment in the legal system in Indonesia. 2) How is the practice of canceling marriages that occur in Indonesia. 3) What are the consequences arising from the cancellation of a marriage based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

*The author thus obtained the data using the juridical approach method and the normative juridical approach method. This research takes place at the Menggala District Court. This study obtained data sources derived from primary data and secondary data. The data obtained by the author were then analyzed using qualitative methods which were then presented with descriptive analysis.*

*From the results of the research that has been done by the author, it can be concluded that 1) Arrangements for annulment of marriage are regulated in 3 rules that regulate clearly and in detail. Arrangements regarding the cancellation of marriages are regulated in Chapter IV Article 22 to Article 28 of the Marriage Legislation, Articles 70 to Article 76 of the KHI and in Chapter VI of Articles 37 and 38 of Government Administration Number 9 of 1975. 2) In practice, an annulment of a marriage can through a mediation process which aims to obtain the best agreement for both parties. Furthermore, in the decision to annul a marriage, the judge must look at the purpose of the marriage itself, whether the proposed marriage annulment is indeed not in accordance with the purpose of establishing a*

*marriage institution. In relation to the annulment of a marriage, the judge must ensure that in granting/rejecting the revocation of the marriage annulment, the judge must ensure that there are benefits provided from the decision to the parties.*

*3) The consequences of annulment of a marriage are regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage article 28 paragraph (2), especially children born from fide marriages, not including joint assets, if the annulment is regulated in the presence of another marriage, as well as other third parties not included in a and b as long as they obtain legal rights.*

***Keywords: Cancellation Of Marriage, Cancellation Of Marriage Practices***